

**IMPLIKASI TINGKAT LITERASI TERHADAP INKLUSI KEUANGAN  
SYARIAH DALAM MENGGUNAKAN PRODUK BMT MASYARAKAT  
PESISIR PANTAI UTARA KABUPATEN TUBAN**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

Oleh:

**JOHAN**

NIM. F02418144

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Johan

NIM : F02418144

Program : Magister (S-2) Ekonomi Syariah

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Agustus 2020

Saya yang menyatakan



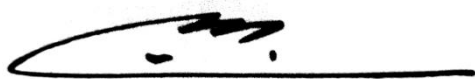
Johan

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tesis yang berjudul “Implikasi Tingkat Literasi Terhadap Inklusi Keuangan Syariah Dalam Menggunakan Produk BMT Masyarakat Pesisir Pantai Utara Kabupaten Tuban” yang ditulis oleh Johan ini telah  
disetujui pada tanggal 09 Juni 2020

**Oleh:**

**Pembimbing I**



Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag  
NIP. 1955111819810310003

**Pembimbing II**



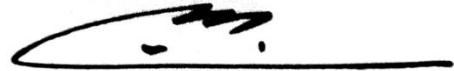
Dr. Mugiyati, MEI  
NIP. 197102261997032001

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis berjudul “Implikasi Tingkat Literasi Terhadap Inklusi Keuangan Syariah Dalam Menggunakan Produk BMT Masyarakat Pesisir Pantai Utara Kabupaten Tuban” yang ditulis oleh Johan ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 30 Juni 2020

Tim Penguji :

1. Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag  
NIP.195511181981031003



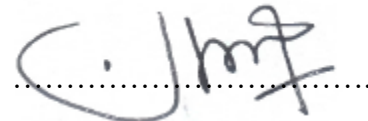
2. Dr. Mugiyati, MEI  
NIP.197102261997032001



3. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag  
NIP.195005201982031002



4. Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM  
NIP.196212141993031002



Surabaya, 13 Agustus 2020  
Direktur,



Prof. Dr . H. Aswadi, M.Ag  
NIP .196004121994031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Johan  
NIM : F02418144  
Fakultas/Jurusan : EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : [johanjio65@gmail.com](mailto:johanjio65@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**IMPLIKASI TINGKAT LITERASI TERHADAP INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGGUNAKAN PRODUK BMT MASYARAKAT PESISIR PANTAI UTARA KABUPATEN TUBAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juni 2020  
Penuli

  
Johan

















persiapan atau berjaga-jaga saat musim sepi/paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder, akibatnya mengalami kesulitan keuangan dan berhutang pada tempat yang kurang tepat. berhutang kepada lintah darat, yang justru semakin memperberat kondisi keuangan. Krisis keuangan dan berbagai problem yang berkaitan dengan ketidak mampuan mengelola keuangan.

Untuk mencapai kesejahteraan diperlukan cara mendapatkan dana yang cukup, pengelolaan keuangan yang baik maka diperlukanlah pengetahuan tentang literasi keuangan dan selanjutnya akan diikuti dengan inklusi keuangan yang bijaksana sesuai kebutuhannya.

Literasi keuangan merupakan informasi dan pengetahuan mengenai konsep dan produk-produk keuangan dapat juga memberikan pengaruh terhadap penggunaan produk investasi keuangan. Di Indonesia, program literasi keuangan dilakukan oleh OJK. Selain itu, keuangan inklusif telah menjadi agenda penting di tingkat internasional maupun nasional. Keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan inklusi ekonomi yang berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah.

Sesuai Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan yang memberikan amanah kepada OJK untuk melakukan edukasi dan perlindungan konsumen masyarakat melalui pelaksanaan program Literasi Keuangan yang terarah dan terukur, diharapkan





dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian yang semakin membaik.

Pemberian literasi keuangan sebagai upaya dari pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, serta memberikan sarana pada masyarakat untuk kemudahan dalam mengakses layanan perbankan, serta tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong cara berpikir masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Literasi keuangan dan inklusi keuangan merupakan program Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatasi rendahnya akses masyarakat di pedesaan terhadap layanan jasa keuangan formal. Gerakan literasi keuangan menjadi program nasional yang bersifat jangka panjang dan dalam implementasinya melibatkan banyak pihak. Program pembangunan literasi keuangan syariah sesungguhnya merupakan upaya strategis mendukung pemerintah (OJK) dalam mewujudkan program nasional dalam membangun dan meningkatkan Literasi Keuangan yang telah dicanangkan Presiden Soesilo Bambang Yudoyono diakhir tahun 2013 lalu.

Literasi yang baik (*well literate*) masyarakat tentunya harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia termasuk literasi tentang keuangan syariah. Industri keuangan syariah global cukup pesat ditegah ketidakpastian pemulihan pasar keuangan dunia sata ini, *Global Islamic Economy Report 2016/2017* menyebutkan bahwa asset keuangan syariah global tahun 2015 mencapai USD 2 triliun dan diproyeksikan nilainya menjadi USD 3,5 Triliun ditahun 2021 (Thomson Reuters, 2016). Indonesia masih menduduiki peringkat Sembilan sebagai *Top Islamic Finance Countries*, jauh dibawah Malaysia yang berada











khususnya masyarakat pesisir di Kecamatan Palang. Supaya masyarakat pesisir pantai utara Kecamatan Palang kabupaten Tuban mempunyai tingkat literasi yang tinggi diharapkan Lembaga-lembaga keuangan Syariah dalam hal ini BMT yang berada didaerah tersebut juga memberikan edukasi literasi tentang keuangan syariah, supaya masyarakat sekitar paham betul tentang produk-produk dan akad pembiayaan dan tabungan yang ditawarkan lembaga keuangan syariah yang berada di pesisir pantai utara Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tersebut.

Tingginya literasi yang dimiliki masyarakat akan diikuti dengan tingkat inklusi keuangan. Pembangunan inklusi di artikan sebagai pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang baru tetapi juga menjamin aksesibilitas yang sama terhadap peluang yang tercipta untuk semua kalangan atau segmen masyarakat, khususnya masyarakat produktif berpenghasilan rendah. Kemudahan akses dapat berupa rendahnya biaya transaksi, jarak yang dekat dengan lembaga keuangan syariah, rendahnya agunan/jaminan untuk memperoleh akses pendanaan/pembiayaan. Mudahnya akses unyuk memperoleh pendanaan/pembiayaan dari lembaga keuangan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dan mengurangi hambatan masyarakat dalam memperoleh modal pembiayaan yang produktif sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri maupun masyarakat sekitar yang bisa membawa kemakmuran dan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat miskin.

Selain itu, akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan merupakan hal penting dalam upaya peningkatan partisipasi seluruh lapisan masyarakat pesisir pantai utara kecamatan Palang Kabupaten Tuban dalam perekonomian. Melalui gerakan literasi dan inklusi keuangan syariah, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman mengenai Lembaga Jasa Keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan syariah, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan syariah. Dengan demikian literasi keuangan diharapkan mampu mendorong individu untuk melakukan keputusan yang tepat dalam mengelola keuangannya. Literasi yang tinggi akan Pada literasi dan inklusi keuangan akan dianggap berhasil jika ada kenaikan tingginya tabungan dan investasi, jika tabungan dan investasi masyarakat rendah maka pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut juga rendah. Peningkatan pemahaman dan kemampuan seseorang dalam literasi dan inklusi keuangan syariah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang selanjutnya akan berujung pada turunny tingkat kemiskinan di masyarakat.

Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah di pesisir pantai utara Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ini beroperasi lebih dari sepuluh tahun silam tentunya masyarakat di daerah pesisir pantai utara Kecamatan Palang ini telah menggunakan produk dan jasa layanan keuangan yang ditawarkan, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah masyarakat sudah paham betul tentang produk-produk pembiayaan, tabungan, dan jasa keuangan lainnya

yang disediakan oleh lembaga keuangan tersebut, berapa tingkat pengetahuan, ketrampilan, keyakinan, sikap dan perilaku keuangan yang masyarakat pantai utara Kecamatan Palang miliki, dan tingkat inklusi keuangannya. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “ Implikasi Tingkat Literasi Terhadap Inklusi Keuangan Syariah Dalam Menggunakan Produk BMT Masyarakat Pesisir Pantai Utara Kabupaten Tuban.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang berhasil di identifikasikan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban masih mencapai 16,87% di Tahun 2017 terutama didaerah pesisir pantai utara Kabupaten Tuban.
2. Masyarakat Pesisir masih ada yang mengakses pinjaman dan layanan dari bank harian dan renternir.
3. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola keuangan sehingga tingkat kesejahteraan sulit tercapai.
4. Masyarakat memanfaatkan produk dan layanan lembaga keuangan syariah tetapi kurang memahami produk dan layanan keuangan tersebut.
5. Rendahnya sikap keuangan dalam mengelola dana dari lembaga keuangan
6. Rendahnya tingkat ketrampilan masyarakat dalam menghitung tingkat suku bunga (*Margin*) pinjaman/pembiayaan.









Tenaga Pendidik Kabupaten Kuningan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji indikator literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah. Objek penelitian ini adalah tenaga kependidikan di Kabupaten Kuningan. Teknik pengumpulan data menggunakan model angket dengan teknik random sampling sebanyak 200 responden. Metode penelitian adalah kuantitatif dan alat analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan Software Lisrel. Hasil penelitian ini adalah sikap keuangan positif signifikan terhadap inklusi keuangan syariah, perilaku keuangan positif signifikan pada inklusi keuangan syariah, dan pengetahuan keuangan positif signifikan pada inklusi keuangan syariah.<sup>15</sup>

Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan dan Febru Winaro Tahun 2019, Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Nelayan Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Tingkat literasi keuangan syariah nelayan desa Pahlawan masih rendah diperlukan sosialisasi oleh lembaga keuangan syariah untuk memberikan edukasi dan sosialisasi tentang lembaga Keuangan syariah<sup>16</sup>

Poppy Alvianolita Sanistasya, Kusdi Rahardjo, Mohammad Iqbal.<sup>17</sup> Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kalimantan Timur Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

---

<sup>15</sup> Hamzah, Amir. 2019. Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Syariah di Kalangan Tenaga Pendidik Kabupaten Kuningan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. Volume 7(2), 175-187.

<sup>16</sup> Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan dan Febru Winaro, "Analisis Tingkat Literasi Literasi Keuangan Syariah Pada Nelayan Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara" *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 2, (2019),1

<sup>17</sup> Poppy Alvianolita Sanistasya, Kusdi Rahardjo, Mohammad Iqbal, "Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kalimantan Timur", *Jurnal Economia*, Volume 14, Nomor 1, (April 2019), 48.

pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha kecil, dan pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja usaha kecil. Jenis penelitian ini adalah penelitian explanatory. Sampel penelitian adalah 100 UMKM yang ada di Kalimantan Timur. Sampel dikumpulkan menggunakan teknik non probability sampling dengan pendekatan sensus yaitu mengambil seluruh UMKM yang beroperasi di Kalimantan Timur untuk dijadikan sampel dan dilakukan pengujian untuk menjawab isu penelitian yang diangkat. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan alat analisis PLS (Partial Least Square). Level unit analisis penelitian ini adalah pelaku usaha kecil di Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja usaha kecil dan inklusi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja usaha kecil.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Budiman, dkk pada tahun 2018 mengenai Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Lingkungan Perguruan Tinggi: Studi Pada Politeknik Negeri Banjarmasin. penelitian ini bertujuan mengungkapkan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Politeknik Negeri Banjarmasin. Metode penelitian bersifat kuantitatif-deskriptif dengan menggunakan survei sebagai cara pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pegawai Poliban relatif sudah cukup baik, sedangkan tingkat inklusinya masih rendah.<sup>18</sup>

Penelitian yang telah dilakukan oleh Hamdani pada tahun 2018 mengenai Analisis Tingkat Literasi Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap

---

<sup>18</sup> Budiman, Mochammad Arif., Mairijani., Mahyuni., Herlinawati, Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Di Lingkungan Perguruan Tinggi: Studi Pada Politeknik Negeri Banjarmasin. *Prosiding Seminar Nasional*. Banjarmasin: Politeknik Negeri Banjarmasin, (2018).

Perilaku Keuangan Pada Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Terbuka. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis tingkat literasi keuangan dan pengaruhnya terhadap perilaku keuangan pada mahasiswa Prodi Manajemen universitas Terbuka. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 500 mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Terbuka. Data dianalisis menggunakan metode Partial Least Square (PLS) dan menggunakan tools SmartPLS. Hasil dari penelitian ini adalah nilai signifikansi terbesar pada variabel literasi keuangan pada mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Terbuka adalah memiliki tabungan yang cukup untuk pengeluaran tidak terduga. Nilai t-statistik pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan sebesar 46.011197, nilai ini lebih besar dari nilai t-tabel 1.98 untuk level signifikan 0.05 (5%) yang menunjukkan signifikansi pengaruh antar variabel laten. Nilai R-square untuk variabel laten Keputusan Berkunjung didapatkan nilai sebesar 0.598824, hal ini menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan berpengaruh sebesar 59.8824% terhadap perilaku keuangan.<sup>19</sup>

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sofuan Jauhari mengenai keuangan inklusi untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro (studi kasus di lembaga manajemen infaq kota Kediri) menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengambilan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis induktif dimana penelitian ini menganalisis pola-pola yang bersifat umum berdasarkan fakta yang

---

<sup>19</sup> Hamdani, Mailani. 2018. Analisis Tingkat Literasi Keuangan Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Keuangan Pada Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Terbuka. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*. Vol. 1, No. 1. Pp 139-145.

kemudian di analisis kepada pola-pola yang bersifat khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keuangan inklusif di LMI kota Kediri di implementasikan melalui program KUBerdaya. Dana pembiayaan diberikan kepada kaum dhuafa' yang kurang modal agar bisa di produktifkan dengan menggunakan akad qordhul hasan dan hibah. Program ini cukup berhasil membuat masyarakat berdaya tetapi program ini belum berjalan secara efisien karena indikator kinerja sepenuhnya belum tercapai. Indikator kinerja meliputi indikator kesediaan akses, indikator penggunaan dan indikator kualitas. Implikasi dari program KUBerdaya sangat positif karena sebagian besar masyarakat yang menerima program tersebut telah merasakan manfaat.<sup>20</sup>

Penelitian yang telah dilakukan oleh Setiawan pada tahun 2016 mengenai Analisis Keterkaitan Inklusi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Personal Masyarakat di Wilayah Kota Dan Kabupaten Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang ada adalah 38 kota/kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sampel yang digunakan adalah 31 kota/kabupaten yang terdiri atas 9 kota dan 22 kabupaten diambil menggunakan teknik stratified random sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis indeks inklusi keuangan dan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan masing-masing kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur berbeda-beda. Seluruh wilayah kota mayoritas memiliki indeks inklusi keuangan yang tinggi, sedangkan wilayah

---

<sup>20</sup> Soufwan Jauhari, keuangan inklusif untuk pemberdayaan Masyarakat melalui pengembangan usaha Mikro (Studi Kasus di Lembaga Manajemen Infaq Kota Kediri) (*Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 109.

kabupaten memiliki indeks inklusi keuangan yang rendah. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa indeks inklusi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku keuangan personal.<sup>21</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Husnul Khotimah tentang analisis efektivitas inklusi keuangan di BMT Syariah Riyal menunjukkan bahwa strategi inklusi keuangan yang di terapkan berdampak positif pada peningkatan inklusi keuangan khususnya di wilayah Kota Bekasi, bahkan BSR telah mengembangkan luasan pemasaran serta layanannya hingga ke Kabupaten Bekasi karena BMT melakukan kerjasama dengan ketua RT, ketua RW, majelis taklim, sekolah, konstituen DPRD setempat. Sistem yang digunakan adalah jemput bola dan memperkuat SDM, memperkuat jaringan dan internal perusahaan sehingga target mampu dicapai dengan baik.<sup>22</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Bintang Badriatul Ummah, dkk yang berjudul Analisis inklusi keuangan dan pemerataan pendapatan di Indonesia menunjukkan bahwa Hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki tingkat inklusi keuangan rendah. Rata-rata indeks inklusi keuangan antar provinsi di Indonesia berkisar antara 0,1-0,33, kecuali Provinsi Jakarta yang tergolong tinggi yang mencapai 0,8. Tingkat inklusi keuangan di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan infrastruktur. Inklusi keuangan memiliki hubungan searah dengan pemerataan pendapatan di Indonesia. Distribusi

---

<sup>21</sup> Setiawan, Moh. Agung. 2016. Analisis Keterkaitan Inklusi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Personal Masyarakat di Wilayah Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Feb. Vol 3, No 2. Pp 1-19.s

<sup>22</sup> Husnul khotimah, analisis efektivitas inklusi keuangan di bmt syariah riyal. *Jurnal ilmiah ekonomi manajemen dan kewirausahaan "optimal"* •vol.10, no. 2• september 2016, 20.













































menyusun asumsi dan hipotesis yang selanjutnya disambung hipotesis yang dirumuskan

**BAB III METODE PENELITIAN**, pada bab ini akan dibahas tentang metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, Jenis dan Sumber Data, teknik pengumpulan data, teknik validasi data, dan teknik analisa data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**, pada bab ini akan ditampilkan mengenai gambaran umum dari obyek penelitian yaitu masyarakat Pesisir di Kabupaten Tuban, di 2 (dua) Desa dengan 4 (empat) obyek penelitian yaitu Desa Karangagung, Desa Glodog, Pemerintah Desa Karangagung dan Pemerintah Desa Glodog, deskriptif analitik, uji kualitas data, dan pengumpulan hipotesis. Mengetahui Implikasi Tingkat Literasi Terhadap Inklusi Keuangan Syariah Dalam Menggunakan Produk BMT Masyarakat Pesisir Pantai Utara Kabupaten Tuban.

**BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN** pada bab ini akan menguraikan data dan pembahasan yang didapatkan dari hasil penelitian dengan analisis Diskriptif Kualitatif. Dengan reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi serta kesimpulan akhir.

**BAB VI PENUTUP** pada bab ini akan disimpulkan hasil penelitian dan saran-saran













tentu saja harus berdasarkan pada perencanaan pengeluaran uang. Perencanaan pengeluaran kita dibentuk berdasarkan pertimbangan akan perencanaan keuangan dalam konteks pencapaian tujuan hidup. Perencanaan Keuangan menurut *Financial Planning Standards Board* Indonesia adalah “Proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana.” Perencanaan keuangan meliputi:

- a. Manajemen arus kas
- b. Perencanaan investasi
- c. Perencanaan pengelolaan risiko dan asuransi
- d. Perencanaan hari tua
- e. Perencanaan pajak
- f. Perencanaan distribusi kekayaan, hibah dan waris.

Dalam melaksanakan perencanaan keuangan, ada beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan, sebagai berikut:

- a. Mendefinisikan tujuan keuangan yang akan dicapai;
- b. Memeriksa kondisi keuangan saat ini;
- c. Mengumpulkan informasi data yang relevan guna pencapaian tujuan keuangan dengan mempertimbangkan kesenjangan antara kondisi keuangan saat ini dengan tujuan keuangan yang ingin dicapai
- d. Membuat rencana keuangan, yaitu membuat rencana tentang apa saja yang harus dilakukan agar tujuan keuangan dapat tercapai







meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>64</sup> Masyarakat kecil menengah diharapkan mampu menjangkau lembaga keuangan tanpa dibatasi oleh kekuarangan modal serta adanya hambatan yang lainnya.

Inklusi keuangan memiliki dua kata utama, yaitu inklusi dan keuangan. Inklusi, secara harfiah diartikan sebagai memasukkan. Sementara itu, keuangan secara harfiah diartikan sebagai hal-hal yang terkait dengan uang. Kedua makna tersebut akan menghasilkan makna baru yang akan melibatkan agenda global jika disentralkan dalam bentuk satu kesatuan. Agenda besar dibentuknya inklusi keuangan adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola resiko, pemanfaatan uang, dan menghasilkan profit serta memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitarnya.<sup>65</sup> *Financial Inclusion* (Keuangan Inklusif) didefinisikan sebagai upaya mengurangi segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan.<sup>66</sup> Keberhasilan yang diharapkan dari masyarakat semata-mata adalah untuk membuka lapangan pekerjaan baru dan mengurangi angka pengangguran yang terjadi di masyarakat.

Definisi lain terkait *Financial Inclusion* menurut *World Bank* (2008) yang dikutip dalam Supatoyo dan Kasmiasi adalah sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan

---

<sup>64</sup> Bank Indonesia, "Plot Project Peningkatan Akses keuangan kelompok masyarakat atau kelompok pelaku usaha melalui pemanfaatan produk/jasa layanan keuangan syariah", 2017.

<sup>65</sup> Irfan Syauki Beik, Laili Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 221.

<sup>66</sup> Halim Alamsyah, "*Pentingnya Keuangan Inklusif dalam Meningkatkan Akses Masyarakat dan UMKM terhadap Fasilitas Jasa Keuangan Syariah*", diakses Tanggal 30 April 2020.









Inklusi keuangan secara garis besar memiliki visi mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, pemerataan pendapatan dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Visi tersebut akan terwujud jika masyarakat memiliki kepercayaan dan keyakinan akan eksistensi lembaga keuangan syariah yang bebas riba dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Adapun misi inklusi keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan agar tercipta kesejahteraan pada lapisan masyarakat menengah dan bawah.
- b. Menyediakan produk dan jasa keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga tidak terjerat dengan praktek-praktek nonformal.
- c. Meningkatkan pengetahuan dan rasa aman masyarakat dalam penggunaan layanan keuangan sehingga menimbulkan keyakinan bahwa layanan jasa keuangan hadir dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat.
- d. Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
- e. Mendorong pengembangan keuangan inklusi untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia.



yang paling mudah adalah memberika edukasi langsung kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan aparaturn pemerintah setempat.

- d. Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan dengan mempermudah dalam menemukan lembaga keuangan serta kemudahan dalam mengurus syarat administrasi. Hambatan bagi orang miskin untuk mengakses layanan keuangan umumnya berupa masalah geografis dan kendala administrasi. Menyelesaikan permasalahan tersebut akan menjadi terobosan mendasar dalam menyederhanakan akses ke jasa keuangan.
- e. Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non bank demi tercapainya program pembangunan pemerintah. Pemerintah harus menjamin tidak hanya pemberdayaan kantor cabang, tetapi juga peraturan yang memungkinkan perluasan layanan keuangan formal. Oleh karena itu, sinergi antara Bank, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi penting khususnya dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan.
- f. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan layanan keuangan agar lebih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat menengah kebawah. Teknologi dapat mengurangi biaya transaksi dan memperluas sistem keuangan formal melampaui sekedar layanan tabungan dan kredit. Namun, pedoman dan peraturan yang jelas perlu ditetapkan untuk menyeimbangkan perluasan jangkauan dan risikonya.







meliputi edukasi terhadap variasi produk/jasa keuangan, edukasi resiko dari penggunaan jasa keuangan, edukasi tentang perlindungan nasabah, dan edukasi tentang keterampilan mengelola keuangan.

- b. Fasilitas keuangan publik adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Inisiatif dalam pilar ini berupa pemberian subsidi dan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan UMKM.
- c. Pemetaan informasi keuangan. Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terutama yang sebenarnya dikategorikan tidak layak untuk menjadi layak atau dari *unbankable* menjadi *bankable* oleh intitusi keuangan normal, terutama kaum miskin produktif serta usaha mikro kecil. Inisiatif pilar ini meliputi: Peningkatan kapasitas melalui penyediaan pelatihan dan bantuan teknis, Sistem jaminan alternatif, Penyediaan layanan kredit yang lebih sederhana, identifikasi nasabah potensial.
- d. Kebijakan peraturan pendukung adalah kebijakan yang dibuat pemerintah dalam rangka mendorong kegiatan sosialisasi produk atau jasa keuangan sekaligus menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, juga membuat kebijakan untuk mendorong perubahan ketentuan. Disamping itu juga, pemerintah menyusun mekanisme penyaluran dana bantuan dari perbankan, memperkuat landasan hukum untuk perlindungan konsumen, serta menyusun kajian tentang inklusi keuangan untuk menentukan arah kebijakan ekonomi sebuah negara.

- e. Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi. Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen potensial di masyarakat dan memperluas jangkauan layanan jasa keuangan dengan memanfaatkan metode distribusi alternatif. Beberapa aspek pada pilar ini meliputi Fasilitas forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga keuangan dengan kelompok masyarakat produktif (layak dan *unbanked*) untuk mengatasi masalah informasi yang asimetri, Peningkatan kerjasama antar lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha, dan Eksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa, dan saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian.
- f. Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan, serta memiliki prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Kelima pilar SNKI ini harus ditopang oleh tiga fondasi sebagai berikut:

- a. Kebijakan dan regulasi yang kondusif Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi dari Pemerintah dan otoritas/regulator.







d. Kesejahteraan: mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa, masyarakat sebagai pelaku yang menggunakan jasa layanan keuangan tentu akan merasakan dampak yang positif ataupun yang negatif. Tergantung bagaimana lembaga keuangan bijaksana dalam menyikap kemauan masyarakat dan masyarakat harus mampu memenuhi segala ketentuan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan.<sup>79</sup>

Sedangkan indikator berdasarkan metodologi yang dikembangkan oleh *Fair Finance Guide International* (FFGI) dalam buku *Pemeringkatan Bank*, mengenai keuangan inklusif yang harus dilakukan oleh perbankan dalam hal pemberian kredit. Indikator keuangan inklusif tersebut seperti lembaga keuangan memiliki kebijakan, layanan dan juga produk yang secara spesifik ditujukan kepada masyarakat miskin dan kelompok marginal; lembaga keuangan memiliki cabang di daerah pedesaan, tidak hanya di perkotaan; besarnya kredit yang diberikan ke sektor UMKM diatas 10% dari total keseluruhan dana kucuran kredit lembaga

keuangan; lembaga keuangan tidak mengharuskan adanya jaminan bagi para pelaku UMKM yang mengajukan pinjaman kredit; serta lembaga

---

<sup>79</sup> Hairatunnisa Nasution, Analisis Financial Inclusion Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Medan (Studi Kasus Pembiayaan Mikro Sumut Sejahtera Ii Di Bank Sumut Syariah), *TESIS*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2017. 57



MP3EI guna menciptakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, sedangkan percepatan penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, dilakukan melalui kemudahan akses pada lembaga keuangan. Adapun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat.

Bagian ketiga Rencana Inklusi Keuangan pasal 19 yang berisi:

- a. PUJK wajib melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.
- b. Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencantumkan:
  - 1) Ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
  - 2) Sasaran kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan
  - 3) Target pengguna produk dan/atau layanan jasa keuangan
  - 4) Jadwal dan wilayah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan
  - 5) Parameter dan bentuk pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.































Kehidupan masyarakat pesisir sangat unik dan kompleks karena banyaknya potensi pekerjaan yang bisa dilakukan, walaupun ruang lingkungannya selalu bersinggungan dengan laut. Permasalahan hari ini adalah, untuk usaha skala besar mayoritas dikuasai oleh investor diluar daerah sehingga masyarakat pribumi hanya mampu mengerjakan skala kecil dan *profit oriented* yang relatif sangat minim. Oleh sebab itu, perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah dan para pemangku kebijakan serta stakeholder untuk bersama-sama mengembangkan dan memberikan kehidupan yang lebih memadai kepada masyarakat pesisir, baik secara ekonomi, sosial dan budaya.

## 2. Karakteristik Perekonomian Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat agraris. Masyarakat agraris menghadapi sumber daya yang terkontrol dengan pola pengelolaan lahan untuk produksi sebuah komoditas dengan hasil yang relatif bisa di prediksi. Karakteristik tersebut sangat berbedan dengan masyarakat nelayan, dimana pola pengelolaan sumber daya tidak terkontrol. Dengan kata lain, pengelolaannya harus berpindah-pindah dari tempat satu dengan tempat lainnya karena kondisi alam yang tidak tetap, perpindahan tersebut juga diikuti oleh tingkat risiko yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, seorang nelayan memiliki kepribadian yang keras, tegas, dan penuh semangat.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 17 ayat 2





nilai-nilai agama, upacara-upacara tersebut bagi sebagian kelompok nelayan hanyalah sebuah *ritualisme*. Maksudnya, suatu tradisi yang terus dipertahankan meskipun telah kehilangan makna sesungguhnya. Jadi, tradisi tersebut dilangsungkan hanya sebagai instrument stabilitas sosial dalam komunitas nelayan.

### c. Peran Perempuan

Aktivitas ekonomi perempuan merupakan gejala yang sudah umum bagi kalangan masyarakat strata bawah, tak terkecuali perempuan yang berstatus sebagai istri nelayan. Istri nelayan umumnya selain banyak bergelut dengan urusan domestik rumah tangga juga tetap menjalankan fungsi-fungsi ekonomi baik dalam kegiatan penangkapan di perairan dangkal, pengolahan ikan maupun kegiatan jasa dan perdagangan. Menurut Pollnac dalam pembagian kerja keluarga nelayan adalah pria menangkap ikan dan anggota keluarga yang perempuan menjual ikan hasil tangkapan tersebut. Peran perempuan ini merupakan faktor penting dalam menstabilkan ekonomi pada beberapa masyarakat penangkap ikan karena pria mungkin menangkap ikan hanya kadang-kadang sementara perempuan bekerja sepanjang tahun. Istri nelayan pada umumnya hanya menjalankan fungsi domestik dan ekonomi, dan tidak sampai pada wilayah sosial politik. Namun sebenarnya isteri nelayan juga kreatif dalam menciptakan pranata-pranata sosial yang penting bagi stabilitas sosial pada komunitas nelayan. Hal ini tampak, misalnya pada pengajian,







Kemandirian masyarakat adalah wujud dari pengembangan kemampuan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan dan memperbaiki material secara adil dan merata yang ujungnya berpangkal pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri berdiri pada satu pemikiran bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakatnya.<sup>100</sup> Kebebasan yang dimaksud adalah memudahkan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada sehingga akan terciptak optimalitas dalam produktivitas di tengah-masyarakat. Masyarakat pesisir yang sering termajinalkan akibat banyaknya peraturan pemerintah yang mendukung perusahaan-perusahaan besar membuat para nelayan kesulitan dalam mengelola sumber daya alam.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan, serta masih perlu usaha sungguh-sungguh untuk mewujudkannya<sup>101</sup> Pemberdayaan dalam dimensi ekonomi seperti ini dimaknai sebagai akses masyarakat atas sumber

---

<sup>100</sup> Modim, Hi. Masita, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Panorama Pantai Disa, Kec. Sahu, Kabupaten Halmahera Barat)*, Skripsi: Universitas Hasanuddin, 2012, 55.

<sup>101</sup> Lihat Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.





Kemudian ngepreh kabur bersama dewi bentaro dan menikah tanpa se izin empu cangan, hingga dikaruniai anak satu laki-laki dan satu perempuan, empu cangan mendengar kabar itu empu marah bukan kepalang, ia kemudian mencabut kerisnya dan mengacungkannya ke utara yakni ketempat tinggal ngepreh dan dewi bentaro, dari ujung keris empu cangan keluarlah puluhan batu besar dan terbang ke arah tempat tinggal ngepreh dan dewi bentaro.

Ngepreh dan dewi bentaro terkejut mendengarkan suara gemuruh glodog-glodog-glodog di belakang rumahnya, kemudian ngepreh berlari sekuat tenaga menyelamatkan kedua anaknya dari hujan batu kiriman empu cangan, ia berhasil menyelamatkan diri namun sayang Dewi Bentaro istri tercinta yang juga saudara kandungnya tewas tertimbun batu besar itu. Mengetahui istrinya tewas oleh santet dari empu cangan, ngepreh pun marah dan mendatangi empu cangan untuk menuntut balas, terjadilah pertarungan yang sengit antara empu cangan dan ngepreh dan akhirnya ngepreh berhasil menusukkan kerisnya tepat dileher empu cangan. Empu canganpun roboh bersimbah darah dan sebelum meninggal sang empu mengeluarkan kutukan bahwa kelak jika penduduk desa nya dan desa tempat tinggal ngepreh menikah maka salah satu dari pasangannya akan mati mengenaskan.





### 3. BMT Surya Raharja

BMT Surya Raharja didirikan pada tahun 2011 di Pasar Pahing Palang. Dipelopori oleh Bapak Taufiqurrochman, S.Ag. Pada tanggal 5 Juli 2014 Koperasi BMT Surya Raharja telah resmi berbadan hukum dengan nomor pengesahan akta pendirian koperasi 19/BH/KDK.13.28/12VII/2014 atas nama Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah yang berkedudukan di Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Setelah diterbitannya peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang sudah berjalan pada saat peraturan Menteri ini berlaku. Akan tetapi melaksanakan usahanya dengan ketentuan wajib menyesuaikan anggaran dasar dengan peraturan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya peraturan ini yaitu tanggal 8 Oktober 2015. maka pada tanggal 18 Januari 2016 KJKS (Koperasi Jasa dan Keuangan Syariah) BMT Surya Raharja berganti menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) BMT Surya Raharja.

Koperasi BMT Surya Raharja didirikan dengan maksud menggalang kerjasama para anggota yang memajukan kepentingan ekonomi anggota pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Selain itu, untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada















**Gambar: 3.3 Struktur BTM Surya Utama<sup>104</sup>**

## b. Produk-produk BMT Surya Utama

- 1) Musyarakah (Kemitraan atau Bagi Hasil) Musyarakah berasal dari kata syirkah yang artinya adalah bekerja sama. Musyarakah berarti akad antara orang-orang yang berserikat 58 dalam modal dan keuntungan. Dalam KSPPS BTM Surya Utama menggunakan akad Musyarakah bertujuan untuk menambah penghasilan antara pemilik modal dan pengelola secara syariah dengan cara mengangsur. Besarnya nisbah bagi hasil yang ditetapkan di KSPPS BTM Surya Utamayaitu sebesar 2,5% per bulan, apabila seorang anggota tidak lagi aktif dalam bekerjasama tetap ada suatu bagi hasilnya yaitu sebesar 1,45% per bulan.
- 2) Mudharabah (Kemitraan atau Bagi Hasil) Produk simpanan yang inovatif dan kreatif yang mengerti dan memahami kebutuhan masyarakat. Simpanan mudharabah memberi keamanan dan keuntungan atas dana anggota. Dengan seluruh minimal Rp. 1.000.000,- anggota sudah memiliki kartu anggota. Keuntungan simpanan mudharabah di KSPPS BTM Surya Utama yaitu : 1) Dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*) 2) Bagi hasil otomatis dikreditkan ke SIWADA (simpanan wadiah) 3) Tidak dipungut administrasi 4) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan  
Besarnya nisbah bagi hasil yang ditetapkan di KSPPS BTM Surya

---

<sup>104</sup> Dokumentasi BTM Surya Utama

Utama yaitu sebesar 2,5% per bulan, apabila seorang anggota tidak lagi aktif dalam bekerjasama tetap ada suatu bagi hasilnya yaitu sebesar 1,45% per bulan. Bagi hasil yang kompetitif karena anggota akan memperoleh pendapatan tinggi dan dapat diberikan bagi hasil 59 spesial bagi anggota yang menempatkan dananya dalam jumlah tertentu. Untuk jangka waktu simpanan fleksibel, anggota dapat menentukan jangka waktu simpanan sesuai dengan kebutuhan keuangan anggota, untuk jangka waktu yang tersedia selama 3,6 bulan atau 12 bulan.

- 3) Murabahah (Jual Beli) Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Di KSPPS BTM Surya Madinah, murabahah ini seperti leasing, karena konsumtifnya lebih rendah. Besar keuntungannya sebesar 2,5%.
- 4) Ijarah Muntahia Bit Tamlik (Sewa Beli) Di KSPPS BTM Surya Utama banyak sekali yang melakukan pembiayaan IMBT, dengan berbagai kebutuhan secara garis besar digunakan untuk modal usaha, pembiayaan yang diajukan mulai dari Rp. 100.000,- dengan menggunakan jaminan BPKB atau surat tanah untuk menjamin apabila suatu saat nanti anggota tidak bisa melunasi pembiayaannya. Untuk harga jaminan harus lebih besar dari biaya pembiayaannya.
- 5) Qardul Hasan Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang akan mememanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Di KSPPS BTM Surya Utama untuk yang digunakan untuk































































pengetahuannya tentang lembaga keuangan syariah. Namun disisi lain juga masyarakat mulai kembali pada lembaga keuangan syariah meskipun sebenarnya mereka masih awam dan tidak mengetahui persis tentang produk dan bahkan akad dengan berbagai sistem. Sehingga peneliti beranggapan bahwa LKMS menjadi kunci utama untuk menjadi garda terdepan sebagai pembangun literasi keuangan syariah guna bisa berperan di masyarakat dalam berbagai aktivitas masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala BMT bahwa BMT akan selalu berinovasi mencari strategi untuk menjadikan masyarakat faham dan memiliki nilai jual tinggi pada produknya di BMT. Dalam hal ini BMT akan menggandeng para penggiat ekonomi syariah, BAZNAS, dan beberapa tokoh desa untuk menciptakan strategi yang bisa tersentuh langsung oleh masyarakat.

Sejalan dengan Agustianto (*Directur Consulting*) pembangunan literasi keuangan syariah akan memberikan hasil manfaat yang bagus untuk masyarakat, LKMS dan pemerintah diantaranya adalah masyarakat mampu memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai kebutuhan mereka, Masyarakat mampu melakukan perencanaan keuangan (*Financial Planning*) secara syariah dengan lebih baik, Masyarakat terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas (investasi bodong), Masyarakat mendapat pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan jasa keuangan syariah. Literasi keuangan syariah juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan syariah, mengingat masyarakat adalah pengguna produk dan jasa keuangan syariah.

Sehingga dari pernyataan Agustianto diatas bahwa Peran lembaga keuangan mikro syariah menjadi bagian penting bagi tercapainya cita-cita mulia mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Dana sosial yang telah berhasil dihimpun harus dikelola melalui perencanaan, pengorganisasi, pengawasan, dan pengendalian yang tepat. Lembaga keuangan mikro syariah diharapkan mampu menginventarisir kebutuhan masyarakat sehingga alokasi dana sosial menjadi efektif.<sup>156</sup>

Sehingga kegiatan dalam peran LKMS merupakan bagian yang tidak kala pentingnya untuk strategi pemasaran LKMS di masyarakat, dengan adanya hasil lapangan pada bab sebelumnya bahwa kendala utama adalah tingkat pemahaman atau pengetahuan yang rendah akan menjadi bumerang jika hal ini terus diabaikan oleh LKMS. Dinas Koperasi dalam hal ini pemerintah ikut proaktif dalam berbagai kegiatan di masyarakat dan sekaligus mendorong BMT untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau sosial.

Untuk mengetahui peran BMT dalam meningkatkan literasi keuangan anggotanya dilakukan wawancara dengan manajer BMT selaku nara sumber utama. Hasil wawancara yaitu BMT memiliki peran sebagai pendidik, penyedia sarana prasarana, dan penyedia produk jasa keuangan untuk literasi keuangan anggota.

---

<sup>156</sup> Masturin, Manajemen Modal Sosial Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat: Studi Pada Baitul Maal Wat Tamwil, *Jurnal Equilibrium*, volume 7, nomor 1, (Kudus, 2019)

Optimalisasi sosialisasi dan pengawasan dengan berbagai program peningkatan literasi keuangan. Optimalisasi dilakukan dengan edukasi dan sosialisasi mengenai pengendalian risiko untuk meningkatkan literasi keuangan anggota, BMT telah melaksanakan beberapa program yaitu program wajib menyimpan dana berupa dana dengan akad wadiah bagi anggota yang menerima pembiayaan guna meminimalisir risiko kredit, kebijakan dibukanya forum diskusi untuk memberi saran kepada anggota yang ingin berkonsultasi tentang bagaimana mengelola usaha mikronya agar menjadi mandiri guna meminimalisir risiko operasional, sosialisasi tentang strategi mengembangkan bisnis kecil oleh BMT kepada anggotanya supaya usaha mikro yang dijalani dapat terhindar dari risiko strategi yang tidak tepat.

Sosialisasi yang dilakukan BMT tidak hanya kepada masyarakat UMKM namun juga pada para intelektual di Indonesia. Seperti siswa, mahasiswa, pondok pesantren, pendidik, dan PNS. Adapun sarana dalam meningkatkan literasi keuangan anggota dilakukan dengan beberapa kegiatan seperti : membentuk tim khusus (*fleksibel*) yang tugasnya memantau anggota yang berada dilapangan, seminar, sosialisasi kepada anggota pelaku UMKM dan para intelektual baik di sekolah formal, informal, perguruan tinggi dan pondok pesantren. Edukasi pengendalian risiko ini dilakukan dengan maksud supaya terwujudnya tujuan dari BMT yaitu menjadikan anggotanya mandiri dalam perekonomian dan melekatkan perekonomian yang akan berpengaruh pada meningkatnya literasi keuangan masyarakat.

Pendidikan dan pengembangan masyarakat tentang sistem keuangan syariah penting dilaksanakan untuk menunjukkan aksi nyata dalam bentuk edukasi dan sosialisasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing BMT memiliki variasi pola pendidikan dan sosialisasi. BMT Surya Raharja melakukan sosialisasi dengan membagikan brosur yang berisi sejarah, visi, misi, strategi, dan tujuan BMT serta produk-produk yang ditawarkan. BMT Surya Utama melaksanakan edukasi dan sosialisasi secara terintegrasi dengan kegiatan pemasaran dan melalui pertemuan per tiga bulan dengan masyarakat sekitar. BMT Surya Raharja juga membagikan brosur dan menyelenggarakan *public festival*. BMT Surya Utama melakukan sosialisasi terhadap calon nasabah terutama tentang perbedaan akad-akad pada sistem keuangan syariah dengan konvensional serta pemahaman tentang prinsip adil. Adapun BMT Surya Raharja tidak banyak melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi karena menganggap sulit untuk merubah *mindset* masyarakat.

Rencana yang telah dibingkai dalam kegiatan edukasi terhadap masyarakat tentang produk keuangan syariah sebenarnya dapat dilakukan secara terjadwal ataupun tidak. Karena kesulitan yang dihadapi oleh BMT pada umumnya ada pada mindset masyarakat pesisir yang masih tertanam dengan sistem keuangan konvensional. apabila fungsi lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT ini bisa diterima oleh masyarakat maka sistem keuangan yang dibangun arus bawah bukan tidak mungkin dapat membangun sistem perekonomian yang kuat. literasi keuangan syariah dilakukan dengan dua cara yaitu :

### 1. Melalui media sosial

Sosialisasi melalui media sosial dan elektronik. Adapun media elektronik dilakukan melalui radio lokal dan media sosial dilakukan dengan *website* resmi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh BMT dapat di saksikan dan di dengar oleh setiap lapisan masyarakat. Salah satu kegiatan yang termuat dalam media sosial adalah kegiatan silaturahmi dan diskusi pengelolaan keuangan dengan antar BMT Jawa Timur, seminar di pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon adalah salah satu bentuk sinergi antar BMT dalam meningkatkan nilai manfaat, serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

### 2. Secara langsung

Sosialisasi secara langsung melalui dua sistem yaitu sosialisasi dilakukan oleh staf karyawan BMT yang bersifat *fleksibel* kepada anggota melalui kegiatan kemasyarakatan, dan yang kedua anggota yang datang ke kantor BMT untuk berkonsultasi secara langsung.

Selain itu untuk optimalisasi BMT yang menjadi salah satu pilar utama dalam tubuh BMT yakni dengan melakukan berbagai optimalisasi penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah bekerjasama dengan Badan Amil Zakat ataupun dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal ini merupakan bagian dari kontribusi BMT untuk membawa bangsa ini keluar dari lingkaran kemiskinan dan meningkatkan literasi keuangan syariah. BMT sangat berpengaruh dalam percepatan pertumbuhan UMKM masyarakat pesisir Tuban. Karena perannya sebagai intermediasi keuangan yang melakukan

penghimpun dana dari masyarakat dan penyalurkan dananya pada usaha-usaha yang bersifat produktif seperti UMKM. Untuk itu dalam pengembangan literasi keuangan syariah perlu adanya optimalisasi peran BMT yaitu memudahkan akses administrasi dalam menyalurkan dana kepada para pelaku usaha menengah kecil mikro, dalam membutuhkan modal atau pendanaan agar usahanya dapat berkembang dan berjalan lancar tanpa hambatan terutama dalam masalah permodalan.

Para pelaku UMKM di pesisir pantai utara Tuban mempunyai kendala dari segi permodalan dalam mengembangkan usahanya ketika mengajukan permohonan tambahan modal kepada BMT. Maka peran BMT dapat menjadi solusi dalam mendukung permodalan bagi para pelaku UMKM, oleh karena itu BMT harus mensetting persyaratan pengajuan tambahan modal lebih mudah dan sederhana dari pada di perbankan. Hal ini juga bisa menjadi salah satu peluang atau sebagai alternatif bagi UMKM agar lebih mudah dalam mengakses permodalan. Selain berperan buntut membantu masalah permodalan bagi UMKM, lembaga keuangan mikro syariah khususnya BMT juga dapat meningkatkan dan menguatkan perekonomian masyarakat. Kemudahan untuk mengakses permodalan yang diberikan oleh BMT mendorong masyarakat untuk membuka usaha-usaha mikro baru. Melalui usaha-usaha ini ekonomi kerakyatan mengalami penguatan. Penguatan ekonomi kerakyatan ini akan memberikan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.



Dengan demikian peran BMT juga dapat membantu upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah juga harus berpihak pada para pelaku usaha mikro, dimana jika itu dikembangkan dapat mengurangi pengangguran dan memperkuat perekonomian bangsa serta upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan akan terpenuhi.

Sehingga untuk terus mengembangkan keberlangsungan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah (BMT) ini perlu adanya peran dan dukungan dari pemerintah berupa sistem regulasi. Dimana jika sistem regulasi ini berpihak kepada lembaga keuangan mikro syariah dan terealisasi dapat memperkuat lembaga BMT ini menjadi lembaga yang sehat dan mandiri.

## **B. Tingkat Inklusi Keuangan Syariah Masyarakat Pesisir Pantai Utara Kabupaten Tuban**

Ketimpangan ekonomi menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk diselesaikan dengan cepat, karena akan mengganggu pemerataan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan ketimpangan ekonomi yang membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginisiasi inklusi keuangan. Dengan adanya inklusi keuangan diharapkan setiap lapisan masyarakat memiliki akses yang sama dalam menggunakan produk keuangan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mempersempit kesenjangan diantara orang kaya dan orang miskin.













		merupakan strategi inklusi keuangan yang di <i>design</i> untuk masyarakat miskin dan kelompok usaha mikro kecil menengah	inklusi keuangan yang di <i>design</i> untuk masyarakat miskin dan kelompok usaha mikro kecil menengah
2.	Lembaga keuangan memiliki cabang di perdesaan	Pelayan tersedia di daerah perdesaan guna menyetarakan pendapatan dan tidak ada perbedaan antara orang miskin dan kaya	BMT Surya Rahardja memiliki cabang disaerah desa pesisir Tuban demi menyetarakan pendapatan masyarakat
3.	Lembaga keuangan menginformasikan hak-hak anggota dan risiko dari pelayanan/produk yang ditawarkan	Informasi yang diberikan kepada anggota sangat jelas dan mendalam, hal ini untuk mengantisipasi adanya pembiayaan macet bagi pengguna jasa pembiayaan	BMT Surya Raharja memberikan informasi yang jelas kepada calon anggota/anggota terkait produk, risiko dan lain-lain. Guna mengantisipasi adanya pembiayaan macet di masyarakat
4.	Persyaratan yang diberikan oleh lembaga keuangan masih bersifat local	Persyaratan yang tersedia untuk masyarakat masih	Persyaratan yang tersedia untuk masyarakat masih







lokal karena sasaran utama inklusi keuangan adalah pedesaan yang masyarakatnya masih termaginkan.

#### 5. Beban biaya

BTM Surya Utama dan BMT Surya Raharja sama-sama memberikan beban biaya yang tidak berat, karena melihat kondisi lingkungan yang berada di pedesaan. Kuantitas dan kualitas kehidupan yang berbeda dengan masyarakat desa menjadi pertimbangan utama dalam menentukan beban biaya masyarakat. oleh sebab itu, BTM Surya Utama dan BMT Surya Raharja mengantisipasi tersebut dengan memberikan biaya yang rendah kepada anggota/masyarakat.

### **C. Implikasi Tingkat Literasi Terhadap Inklusi Keuangan Syariah Masyarakat Pesisir Tuban.**

Literasi keuangan syariah merupakan titik tumpu LKMS dalam memberikan atau membuat program dalam beberapa kegiatan masyarakat pesisir pantai Tuban yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Dalam hal ini akan berdampak pada tiga aspek yakni *knowledge*, agama dan ekonomi. Yang dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Aspek *Knowledge*

Aspek *knowledge* merupakan aspek pengetahuan yang berkait sejauh mana masyarakat mengetahui pada sesuatu yang menjadi pembahasan. Telah diketahui di bab sebelumnya bahwa literasi keuangan syariah dalam mengetahui produk keuangan syariah masyarakat pantai pesisir utara Tuban bisa dikatakan rendah, rendah tersebut berdasarkan hasil lapangan bahwa





Berdasarkan gambar diatas hakikat dari implikasi literasi keuangan syariah akan terus berdampak pada warna biru. Artinya *knowledge* adalah dasar, Agama merupakan tuntunan dan ekonomi merupakan sumber kehidupan. Maksud dari pada *Knowledge* sebagai dasar adalah pengetahuan masyarakat yang rendah harus bisa memanfaatkan waktu untuk selalu ikut aktif dari beberapa kegiatan literasi keuangan syariah, mereka dari berbagai *background* bisa kerjasama dalam saling memberitahu atas produk produk yang telah difahami.

Dari dasar ini akan beranjak pada aspek agama, tidaklah rugi pengetahuan tentang literasi sesungguhnya merupakan ajaran syariat islam. Karena didalamnya akan diberikan wawasan tentang transaksi ribawi, akad-akad transaksi di BMT dan lain sebagainya. Sehingga dari keduanya ini akan menghasilkan perubahan ekonomi berupa dampak aspek ekonomi yang maju.

Ketiga aspek diatas juga berjalan dengan adanya upaya atau peran LKMS dalam meningkatkan literasi keuangan syariah. Adapun peran untuk membangun literasi keuangan syariah tersebut terbagi sebagai berikut.

#### 1. Sinergi antar BMT

Erat tangan antar BMT merupakan sinergi atau kerjasama bersama guna saling mendorong dan mendukung kegiatan literasi keuangan syariah di masyarakat. Antar BMT ini akan menjadi penerang pada kemajuan LKMS di masyarakat pesisir utara Tuban dengan mengadakan atau berinovasi











	memiliki pendapatan Rp. 1.600.000 perbulan sebelum melakukan pembiayaan.	pembiayaan, Kasmuah mampu meningkatkan pendapatannya menjadi Rp. 1.800.000 perbulan.
Siti Kusnuriyah	Seorang penjual sayur dan bubur keliling dengan pendapatan rata-rata perbulan sebesar Rp. 1.700.000. sebelum melakukan pembiayaan	Setelah melakukan pembiayaan, Ibu Siti Kusnuriyah pendapatannya mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.800.000 perbulan.
Inawaroh	Seorang penjual nasi dan jajanan keliling mempunyai pendapatan sebesar Rp. 1.200.000 perbulan sebelum melakukan pembiayaan kepada Lembaga keuangan.	Setelah melakukan pembiayaan pendapatan Ibu Inawaroh mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.800.000 perbulan.
Mahnin	Sorang penjahid yang pendapatan perbulannya sebesar 1.400.000 perbulan	Setelah mendapatkan pembiayaan pendapatan Ibu Mahnin mengalami peningkatan sebesar 2.000.000 perbulan.
Astutik	Seorang penjual jajanan keliling yang pendapatannya sebesar Rp. 1.600.000 perbulan	Setelah mendapatkan pinjaman dari BMT pendapatannya mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.100.000 perbulan



keinginan untuk kepemilikan barang atau pelaksanaan kegiatan tertentu maupun dalam upaya mengembangkan usaha yang dimiliki. Layanan tersebut ditawarkan oleh BMT Surya Raharja dan BTM Surya Utama kepada masyarakat Desa Karangagung dan Desa Glodog, namun belum semua masyarakat mengetahui berbagai jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal tersebut.

Walaupun pemahaman literasi masyarakat relatif rendah, tetap penggunaan akan produk-produk BMT Surya Raharja dan BTM Surya Utama masih relatif tinggi. Hal ini terjadi karena mayoritas masyarakat sangat kekurangan modal dalam mengembangkan usahanya. Hadirnya BMT Surya Raharja dan BTM Surya Utama di tengah-tengah masyarakat desa telah mampu menghidupkan siklus ekonomi masyarakat. Para UKM di daerah pesisir pantai Utara Kabupaten Tuban pendapatannya meningkat secara signifikan sehingga ekonomi keluarga menjadi lebih baik. Tidak hanya itu, kualitas pengetahuan tentang lembaga keuangan dan berdagang secara islami ikut meningkat. Hal itu dikarenakan adanya pendekatan persuasif oleh pihak BTM Surya Utama dan BMT Surya Raharja.



keuangan non bank (BTM Surya Utama dan BMT Surya Raharja. Jumlah penabung di BTM Surya Utama meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2018 jumlah anggota sebanyak 8.104 dan pada tahun 2019 jumlah anggota meningkat menjadi 9.448, dengan kata lain, terdapat kenaikan persentasi anggota untuk daerah pesisir pantai utara Kabupaten Tuban. Kenaikan persentase tersebut sekitar 16% dari total jumlah anggota yang terdiri dari simpanan dan pembiayaan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Untuk jumlah anggota dari BMT Surya Raharja juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2018 sebanyak 7.700 anggota dan pada tahun 2019 jumlah anggota naik menjadi 9.200. jika di prosentasikan, kenaikan total anggota yang terdiri dari tabungan dan pembiayaan sebesar 19%. Dengan kata lain, strategi nasional inklusi keuangan telah berhasil di implementasikan pada masyarakat desa berkat kerjasama pada semua pihak.

3. Pengetahuan masyarakat pesisir pantai utara Kabupaten Tuban tentang literasi keuangan syariah masih sangat minim / rendah tetapi tidak sebanding dengan tingkat inklusi keuangan syariah masyarakat pesisir pantai utara Kabupaten Tuban yang tinggi, hal itu disebabkan adanya pelayanan yang baik, kemudahan masyarakat dalam mengakses pembiayaan dari masyarakat, biaya yang rendah serta kepercayaan dari masyarakat untuk menyimpan uangnya pada lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berada di masyarakat pesisir pantai utara











- Andreas dan Enni Savitri, peran pemberdayaan masyarakat pesisir dan modal sosial, Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Kabupaten Meranti Dan Rokan Hilir, cetakan I agustus, 2019.
- Andrianto, Afrian. *Tingkat Kemiskinan Masyarakat Pesisir* (Studi Kasus di Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran). SKRIPSI. Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.
- Atkinson, A. Dan Messy, F. Promoting Financial Inclusion Through Financial Education: Oecd/Infe Evidence, Policies And Practice. Oecd Working Papers On Finance, Insurance And Private Pensions, No. 34, (2013), Oecd Publishing.
- Bank Indonesia, “Plot Project Peningkatan Akses keuangan kelompok masyarakat atau kelompok pelaku usaha melalui pemanfaatan produk/jasa layanan keuangan syariah”, 2017.
- Bps, “*Persentase Penduduk Miskin September 2017 Mencapai 10,2%*. (Online)” (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html>, Diakses Tanggal 03 Februari 2020).
- Budiman, Mochammad Arif., Mairijani., Mahyuni., Herlinawati, Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Di Lingkungan Perguruan Tinggi: Studi Pada Politeknik Negeri Banjarmasin. Prosiding Seminar Nasional. Banjarmasin: Politeknik Negeri Banjarmasin, (2018).
- Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, Booklet Keuangan Iklusif, 2019..
- Group Pengembangan Keuangan Inklusif Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Nasional, *Strategy for Financial Inclusion Fastering Economic Growth and Accelerating Poverty Red uction*, (Juni 2012).
- Hamzah, Amir, “Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Syariah di Kalangan Tenaga Pendidik Kabupaten Kuningan”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Volume 7 (2), (2019).
- Imron, Ali. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Klaster Ikan (Studi pada Masyarakat Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung). SKRIPSI. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung 2017.

- Jauhari, Soufwan. keuangan inklusif untuk pemberdayaan Masyarakat melalui pengembangan usaha Mikro (Studi Kasus di Lembaga Manajemen Infaq Kota Kediri) (*Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018)
- Joshi, Deepali Pant, “Financial Inclusion And Financial Literacy. Rbi-Oecd Seminar. India: Reserve Bank Of India, (2011).
- Khatimah, Husnul. analisa efektivitas inklusi keuangan di BMT syariah Riyal. *Jurnal ilmiah ekonomi manajemen dan kewirausahaan Optimal*” Vol 10, No 2, (September 2016).
- Khotimah, Husnul, analisis efektivitas inklusi keuangan di bmt syariah riyal, *jurnal ilmiah ekonomi manajemen dan kewirausahaan “optimal”* •vol.10, no. 2• september (2016).
- Leeladhar, V, “Taking Banking Services To The Common Man-Financial Inclusion. India: Reserve Bank Of India Bulletin, (2006).
- Lihat Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Lusardi Et Al, Financial Literacy Among The Young, *Journal Of Consumer Affairs Volume 44 Issue 2*, (2010), 50-51.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S, Financial Literacy Around The World: An Overview. *Journal Of Pension Economics And Finance*, 10 (04), (2007).
- Mardani, D. A. Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia. *al-Afkar Journal for Islamic Studies*, Vol. 1. No. 2, (2018, January), 104- 119.
- Masturin, Manajemen Modal Sosial Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat: Studi Pada Baitul Maal Wat Tamwil, *Jurnal Equilibrium*, volume 7, nomor 1, 2019.
- Modim, Hi. Masita, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Panorama Pantai Disa, Kec. Sahu, Kabupaten Halmahera Barat)*, Skripsi: Universitas Hasanuddin, Makasar, 2012, 55.
- Nasution, Anriza Witi. Marlya Fatira AK. Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan dan Perbankan Syariah, *Jurnal Equilibrium* Volume 1 Nomor 7 (September, 2019), 40-63.

- Nasution, Anriza Witi., Fatira, Marlya, “Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan dan Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 7, Nomor 1, (2019).
- Nasution, Hairatunnisa. “Analisis Financial Inclusion Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Medan (Studi Kasus Pembiayaan Mikro Sumut Sejahtera Ii Di Bank Sumut Syariah).” TESIS, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2017.
- Nengsih, Novia. Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia, *Jurnal Etikonomi*, Vol 14 No 2 (Oktober 2015), 223-224.
- OJK & Kemendagri, Buku Pedoman Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta, 2016.
- Oktavianti, Veny. “Pengaruh Literasi Keuangan Dan Persyaratan Kredit Terhadap Akses Kredit Formal Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Surabaya.” Tesis, Fakultas Teknologi Industri, 2017.
- Otoritas Jasa Keuangan, Perencanaan Keuangan Seri Literasi Keuangan, 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, 2014.
- Otoritas Jasa Keuangan, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) revisit. 2017
- Otoritas jasa Keuangan,”Lembaga Keuangan Mikro”  
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx>  
 (23 Desember 2018)
- Rodika, Deri Ofit. “implementasi inklusi keuangan melalui pembiayaan warung mikro di bank syariah mandiri kc curup,” SKRIPSI. Jurusan Perbankan Syari’ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (iain) curup 2018.
- Sanjaya dan Nursechafi, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 18, Nomor 3, Januari 2016.
- Siregar, Rizal Ma’ruf Amidy, “Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pedagang Pasar Di Kota Padang Sidempuan”, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 4, No. 2, (2018).
- Umar, A. I., Index Of Syariah Financial Inclusion In Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 20 (july 2017), 100-126.



